

ISSN 1979-5394

# TITIK-TEMU

## JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 5, Nomor 2, Januari - Juni 2013

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Nurcholish Madjid Society

Graha STR, Lt. 4, Jl. Ampera Raya No. 11, Kemang

Jakarta Selatan 12550

E-mail: titik.temu@yahoo.com

### Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

### Wakil Pemimpin Redaksi

Muhamad Wahyuni Nafis

### Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Rahmat Hidayatullah

### Redaktur Pelaksana

Sunaryo

### Dewan Redaksi

Budhy Munawar-Rachman • Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer •  
Moh. Monib • Muhamad Wahyuni Nafis • Rahmat Hidayatullah •  
Sunaryo • Yudi Latif • Zainun Kamal

### Pewajah Sampul

Taqi Kanara

### Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

*Titik-Temu* terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman ukuran A-4 dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 2, Januari - Juni 2013

ISSN 1979-5394

# TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 5, Nomor 2, Januari - Juni 2013

## DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Bila Tuhan Mencintai Hamba-Nya	5
Pengantar	7-9

### SAJIAN KHUSUS

Kebebasan, Kepartaian, dan Demokrasi <i>Nurcholish Madjid</i>	13-21
Nurcholish Madjid, Islam, dan Konsolidasi Demokrasi <i>Djayadi Hanan</i>	23-40
Jangan Berhenti pada Simbol, Tetapi Harus Menggapai Substansi <i>Muhamad Wahyuni Nafis</i>	41-46

### ARTIKEL

<i>The State of Our Democracy:</i> Menata Ulang Gagasan dan Praktik Demokrasi di Indonesia <i>Bahtiar Effendy</i>	49-95
Antara Rasionalitas Sekuler dan Artikulasi Keagamaan: Peranan Agama dalam Ruang Publik menurut Jürgen Habermas <i>Arif Susanto</i>	97-111

DAFTAR ISI

Isa al-Masih menurut Islam <i>Waryono Abdul Ghafur</i>	113-150
Belajar Menjadi Manusia <i>Kautsar Azhari Noer</i>	151-164
<b>RESENSI BUKU</b>	
Islam Agama Cinta dan Kebahagiaan <i>Pipin Suhendar</i>	167-172
Membela <i>Wahdat al-Wujūd</i> <i>Abdul Muaz</i>	173-177
<b>MAKLUMAT</b>	
Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	181-182
Ucapan Terima Kasih	183
Pembetulan	184
Berlangganan <i>Titik-Temu</i>	185

# KEBEBASAN, KEPARTAIAN, DAN DEMOKRASI<sup>1</sup>

*Nurcholish Madjid*

## **Mukadimah:**

### **Wawasan Kenegaraan Madinah**

Perolehan paling asasi bagi rakyat Indonesia dari keberhasilan gerakan reformasi ialah kembalinya kebebasan ke tangan mereka setelah hilang sekian puluh tahun lamanya. Pangkal kebebasan itu ialah tiga kebebasan asasi: kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat (*freedom of speech, of assembly, and of association*). Lekat sekali dengan kebebasan-kebebasan itu ialah kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*). Setelah hilang sekian lama, siapa pun sekarang merasakan betapa kebebasan-kebebasan itu sangat berharga dan membawa rasa bahagia.

Kebebasan adalah sumber energi kemanusiaan yang paling dahsyat. Sebelum seseorang menginginkan sesuatu yang lain bagi hidupnya, kebebasan adalah yang paling mereka dambakan. Tembok Berlin adalah saksi bagi perjuangan perorangan paling dramatis bagi manusia untuk memperoleh kebebasan. Hanya untuk nilai dasar kemanusiaan yang satu ini, banyak orang (dari Jerman Timur saat itu) yang menentang peluru rezim komunis dengan melintasi Tembok Berlin.

---

<sup>1</sup> Makalah ini disampaikan sebagai bahan diskusi di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) di Ciputat pada 9 Juni 1998.

Inti nilai kemanusiaan universal adalah kehormatan atau harkat dan martabatnya. Dalam Pidato Perpisahan Nabi *saw* (*Khuthbat al-Wadā'*) di Padang Arafah dalam kesempatan beliau menunaikan ibadah haji (satu-satunya), masalah kehormatan kemanusiaan itu ditegaskan sebagai salah satu dari tiga hak kemanusiaan yang paling suci. Tiga hak kemanusiaan yang paling suci ditegaskan oleh Nabi *saw*, yaitu hak hidup (*dimā*), hak memiliki harta (*amwāl*), dan hak terjaga kehormatan atau harkat dan martabatnya (*a'rādl*). Tiga Serangkai *al-dimā' wa al-amwāl wa al-a'rādl* itu di Eropa Barat melalui John Lock, menjadi sejajar dengan tiga serangkai *life, liberty and property*, dan di Amerika, melalui Thomas Jefferson menjadi sejajar dengan tiga serangkai *life, liberty and pursuit of happiness*. Prinsip-prinsip itu untuk pertama kalinya mengambil bentuk dokumen legal-konstitusional resmi negara dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika, dan Amerika Serikat pun lahir sebagai negara kebangsaan modern (*modern nation state*) pertama di dunia.

Tapi menurut Robert N. Bellah, percontohan untuk negara kebangsaan modern itu ialah tatanan sosial politik Nabi Muhammad yang kemudian dikembangkan oleh para Khalifah Bijaksana (*al-Khulafā' al-Rāsyidūn*). Lebih lengkapnya, tentang tatanan sosial politik ajaran Nabi yang kemudian dikembangkan oleh para Khalifah Bijaksana itu Robert Bellah mengatakan demikian:

There is no question but that under Muhammad, Arabian society made a remarkable leap forward in social complexity and political capacity. When the structure that took shape under the Prophet was extended by the early caliphs to provide the organizing principle for a world empire, the result is something that fits its time and place is remarkably modern. It is modern in the high degree of commitment, involvement, and participation expected from the rank-and-file members of the community. It is modern in the openness of its leadership positions to ability judge on universalistic grounds and symbolized in the attempt to institutionalize a nonhereditary top leadership. Even in the earliest times certain restraints operated to keep the community

from wholly exemplifying these principles, **but it did so closely enough to provide a better model for modern national community building than might be imagined** (Huruf tebal dari saya — NM). The effort of modern Muslims to depict the early community is a very type of equalitarian participant nationalism is by no means an unhistorical ideological fabrication.

In a way the failure of the early community, the relapse into pre-Islamic principles of social organization, is an added proof of the modernity of the early experiment. it was too modern to succeed. The necessary social infrastructure did not yet exist to sustain it.<sup>2</sup>

Jika disebutkan oleh Bellah bahwa struktur sosial-politik yang dibentuk Nabi itu “sangat modern” (*remarkably modern*) bahkan “terlalu modern untuk dapat berhasil” (*too modern to succeed*). Kenyataannya ialah bahwa struktur itu runtuh bersama runtuhnya kekhalifahan cerdas (*khilāfah rāsyidah*) (dengan terbunuhnya Khalifah Ali pada tahun 40 Hijriah — tiga puluh tahun sejak wafat Nabi) dan tampilnya Dinasti Umawiyah di Damaskus. Dinasti Umawiyah mengakhiri unsur modernitas struktur kemasyarakatan Madinah, yaitu “*the high degree of commitment, involvement, and participation expected from the rank-and-file members of community*” (tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang tinggi, yang diharapkan dari seluruh lapisan anggota masyarakat). Rezim Umawiyah juga menghilangkan unsur modernitas dari struktur masyarakat Madinah, yaitu unsur “*the openness of its leadership positions to ability judged on universalistic grounds and symbolized in the attempt to institutionalize a nonhereditary top leadership*” (keterbukaan posisi kepemimpinan terhadap kemampuan yang berdasarkan asas-asas universal dan dilambangkan dalam percobaan untuk melembagakan pimpinan puncak yang tidak bersifat warisan). Ketika Muawiyah menunjuk Yazid, anaknya sendiri, pertimbangan dalam mengangkat pemimpin

---

<sup>2</sup> Robert N. Bellah, *Beyond Belief*, edisi paperback (New York: Harper & Row, 1976), h. 150-51.

beralih dari asas-asas universal (yakni, khususnya kemampuan dan kecakapan yang terukur secara terbuka) ke asas kenisbatan atau *ascriptive* (seperti pertalian darah). Dari sudut pandangan ajaran Islam, seperti terwujud secara embrionik dalam struktur masyarakat Madinah, sungguh menyedihkan bahwa sejak Yazid ibn Muawiyah itu dunia Islam hanya mengenal sistem dinasti geneologis. Rezim-rezim yang muncul selalu dikenal dengan identitas sangat sempit dan partikularistik dalam bingkai kesukuan, keanggotaan klan, atau kekeluargaan (Umawiyah, Abbasiyah, Safawiyah, Fatimiyah, Usmaniyah, Hasyimiyah, Su'udiyah, dan seterusnya). Betapa gawatnya kenyataan itu sebagai penyimpangan dari asas ajaran Islam, dapat kita rasakan jika kita bandingkan dengan wanti-wanti Nabi *saw*, bahwa wawasan hidup bermasyarakat atas dasar kefanatikan sempit (*'ashabiyah*) adalah wawasan hidup jahiliyah.

Sejak hilangnya wawasan modern warisan ajaran Nabi itu dunia Islam mulai rawan untuk kejangkitan “despotisme timur.” Penguasa pun mulai tampil dengan klaim sebagai “Wakil Tuhan di bumi” (*Khalīfatullāh fī al-ardl*), atau “Bayangan Tuhan di bumi” (*Zhillullāh fī al-ardl*), padahal menurut pandangan asalnya, seorang penguasa adalah Wakil Rasulullah (*Khalīfat al-Rasūl*). (Sedangkan kedudukan sebagai Wakil Tuhan di bumi [*Khalīfatullāh fī al-ardl*], sepanjang ajaran al-Qur'an, dipunyai oleh seluruh umat manusia tanpa kecuali, melalui masing-masing pribadinya; karena itulah setiap pribadi akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kegiatannya selama di bumi ini). Dan amat ironis bahwa dunia Islam baru dapat belajar kembali mengangkat pimpinannya melalui pemilihan terbuka hanya setelah berkenalan dengan konsep-konsep kenegaraan republik dan demokrasi modern dari Barat.

### **Wawasan Negara Kebangsaan Modern (*Modern Nation State*)**

Dalam memasuki Orde Reformasi, yang paling mendasar diperlukan ialah kemantapan tentang wawasan negara kebangsaan

modern. Wawasan negara kebangsaan modern adalah wawasan kenegaraan yang bertumpu kepada sistem sosial-politik yang melindungi tiga pangkal hak asasi di atas (hidup, pemilikan harta dan kehormatan), dan yang mendorong dengan kuat tumbuhnya partisipasi umum dari masyarakat dalam kehidupan kenegaraan dan terbukanya penilaian bebas terhadap kinerja pimpinan kenegaraan dari semua lapisan.

Bertitik tolak dari wawasan itu, dalam Orde Reformasi ini secara *a priori* kebebasan kebebasan asasi harus dijamin dan dilindungi dengan penuh kesungguhan. Kebebasan menyatakan pendapat secara bebas secara *a priori* harus diwujudkan, khususnya melalui kebebasan pers dan akademik. Kebebasan berkumpul melahirkan keharusan *a priori* untuk melaksanakan dan menjaga kebebasan mengadakan pertemuan-pertemuan. Dan kebebasan berserikat, mendirikan perkumpulan, terutama partai politik, adalah kemestian *a priori* bagi tegaknya wawasan negara kebangsaan modern itu.

Tapi penyebutan semua kebebasan asasi itu sebagai pangkal keharusan-keharusan *a priori* tidaklah berarti dibenarkannya pelaksanaan kebebasan tanpa batas. Seperti peringatan Bung Hatta dalam risalah klasiknya, *Demokrasi Kita*, kebebasan tanpa batas akan hanya mengundang lawannya, yaitu penindasan. Situasi kacau akibat kebebasan tak terkekang dan tak bertanggungjawab akan menjadi landasan pembenaran bagi tampilnya orang kuat, dan orang itu kemudian akan bertindak mengatasi kekacauan itu dengan tangan besi. Dihadapkan kepada pilihan antara “kacau” dan “tertib,” rakyat banyak secara logis akan memilih “tertib”, berapapun pengorbanan yang diberikan. Realisme sosial-politik ini tercermin dalam adagium pandangan politik Islam Sunni yang cukup terkenal (yang konon berdasarkan sabda Nabi), bahwa “penguasa yang *fājir* (banyak dosa) namun kuat (untuk mengantisipasi kekacauan atau *dlawdlā*) adalah lebih baik daripada penguasa yang lemah (yang tidak mampu mengatasi kekacauan, meskipun tidak *fājir*).

Namun tentu saja hal di atas itu pilihan terpaksa yang sangat tidak baik, bahkan sangat buruk. Bagaimanapun, seperti ditegaskan oleh Nabi sendiri dan para Khalifah Bijaksana, kebebasan adalah

yang lebih berharga, sedangkan tirani (*thughyān*) dalam bentuk apapun adalah seteru kemanusiaan. Itulah pelajaran moral yang harus ditarik dari cerita tentang Fir'aun yang dituturkan berulang-ulang dalam Kitab Suci. Oleh karena itu, demi kebutuhan dan kemantapan kebebasan itu sendiri, kebebasan juga secara *a priori* menuntut adanya kedewasaan sosial politik dan rasa tanggung jawab yang sangat tinggi dari setiap individu anggota masyarakat. Hanya dengan begitu kebebasan akan terpelihara dan dapat menghantarkan anggota masyarakat menuju realisasi tujuan-tujuan kemanusiaan yang lebih tinggi.

Maka kebebasan yang fungsional ialah kebebasan yang terbatas oleh kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial yang tinggi. Berkaitan dengan ini, ancaman terhadap kebebasan yang fungsional itu akan datang dari potensi setiap pribadi manusia untuk tumbuh menjadi tiran. Allah mengingatkan orang-orang beriman dalam al-Qur'an, "Ingatlah, sesungguhnya manusia itu pasti bertindak tiranik saat ia melihat dirinya berkecukupan" (Q 96: 6-7). Tirani akan mengancam tampil jika tumbuh perasaan tidak perlu kepada orang lain dalam kemestian hidup bermasyarakat, dan jika kesadaran sosial hilang dari banyak individu.

Dengan kebebasan yang disertai kesadaran tanggung jawab sosial yang tinggi itu, wawasan negara kebangsaan modern (*modern nation state*) memperoleh sistem operasionalnya yang kuat. Partisipasi umum dan penilaian terbuka terhadap kinerja penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara positif dan produktif. Mekanisme pengawasan sosial dan berfungsinya kekuatan pengimbang terhadap kekuasaan akan dapat berjalan demi kebaikan semua. Dalam penjabaran pandangan tentang kenegaraan modern, fungsi pengawasan sosial dan kekuatan pengimbang itu dilembagakan dalam kemungkinan terbentuknya oposisi secara resmi. Dengan partai oposisi itu kegiatan pengawasan dan pengimbangan tidak terbiarkan berjalan sekenanya (*accidental*), tapi penuh kesadaran dan pengarahan (*deliberate*). Melalui mekanisme pengawasan sosial yang efektif dan bebas dari manipulasi dan rekayasa itu segala "penyakit sosial-politik" seperti penyalahgunaan kekuasaan dan

korupsi sebagai pelanggaran moral kemasyarakatan (*civic morality*), juga penyelewengan moral pribadi (*personal morality*) dapat dicegah sampai batas maksimal.

## Masalah Kepartaian

Suasana beberapa minggu setelah keberhasilan pertama agenda Reformasi melahirkan situasi kegembiraan (*euphoria*) dan antusiasme, bahkan semangat kemenangan (*triumphalism*). Dari sudut kejiwaan masyarakat umum, semuanya itu adalah wajar belaka, mengingat kebebasan itu telah lama hilang dan sekarang tiba-tiba ada di tangan. Situasi itu kemudian mendorong munculnya gejala yang cukup mencolok saat-saat ini, yaitu ramai-ramai mendirikan partai politik. Inipun harus dipandang sebagai hal yang absah belaka, karena perwujudan dari prinsip kebebasan berserikat.

Tapi digabungkan dengan masalah tanggungjawab sosial di atas tadi, ada baiknya setiap orang dari kita memikirkan konsekuensi-konsekuensi negatif tak terduga dari gejala luapan gembira tersebut. Mungkin juga harus dipikirkan dari sejak masa amat dini ini bagaimana membuat suatu cara dan mekanisme yang absah dan dapat diterima oleh semua untuk menangkal akibat-akibat yang tidak diinginkan itu. Tanpa mengurangi hak setiap orang untuk melaksanakan kebebasannya, suatu ketentuan legal formal agaknya harus dibuat agar terjadi proses pilihan alamiah (*natural selection*) yang wajar, sehingga timbulnya unsur-unsur yang merugikan masyarakat dan negara dalam arti seluas-luasnya dapat dicegah. Dalam hal ini, sudah banyak terdengar suara agar dalam ketentuan-ketentuan legal-formal itu ditetapkan suatu ketentuan persentase perolehan suara pemilih, sehingga suatu partai yang tidak mampu memenuhi ketentuan itu akan sendirinya gugur atau harus bergabung dengan yang lain.

Demikian pula logo-logo kepartaian harus diarahkan begitu rupa pembentukan dan pertumbuhannya sehingga melahirkan

suatu struktur politik yang paling baik untuk mendukung ide-ide universal reformasi dan demokrasi. Pelarian yang terlalu gampang kepada “kartu terakhir” seperti logo komunalistik diperkirakan akan dapat menghambat pertumbuhan dan pelaksanaan ide-ide universalistik (artinya, tidak partikularistik) dari gerakan reformasi dan demokratisasi. Pengalaman kenegaraan kita di masa lalu menunjukkan hal yang demikian itu.

Logo dan perlambang aspirasi politik yang mewujudkan nyata dalam ide kepartaian akan lebih baik jika langsung dikaitkan dengan satu nilai masyarakat madani, seperti asas keadilan, persamaan manusia, keterbukaan atau transparansi, keadaban (*civility*), dan partisipasi universal. Penghargaan kepada sesama manusia menurut harkat dan martabatnya yang paling asasi menghendaki pengembangan rasa cinta kasih kepada sesama manusia dalam semangat cinta kasih ilahi (*rahmah, agape*), dan tidak boleh berhenti hanya kepada ukuran kecintaan fisiologis-biologis (*mahabbah, eros*), serta sebagai peningkatan lebih tinggi dari cinta kearifan kemanusiaan (*mawaddah, philos*).

Berkaitan dengan itu, sebagai bagian dari kedewasaan bermasyarakat, orientasi maknawi (esensial) harus terus-menerus diusahakan dapat menggantikan orientasi *ramzī* (“rumus”, perlambang, simbolik), sehingga dapat disadari dengan tepat perbedaan penting antara mana yang intrinsik dan mana yang instrumental dalam proses-proses dan struktur-struktur politik yang ada. Dalam Tafsir Baidlawi diisyaratkan bahwa tauhid pun dalam tingkatnya yang paling tinggi harus mampu beranjak meninggalkan “tauhid nama” ke “tauhid esensi” (Lihat Baidlawi, dalam menafsirkan Q17: 110 (التوحيد إنما هو للذات الذي هو المعبود المطلق)). Jelas perkara ini menuntut kemampuan berpikir yang lebih tinggi (masyarakat awam cenderung lebih menekankan segi-segi simbolik, namun kemampuan itu sama sekali tidak mustahil dan sebagai agenda pendewasaan sosial-politik harus diusahakan pewujudannya secara sungguh-sungguh).

Orientasi esensi, bukannya simbol, akan lebih mudah membuka wawasan luas untuk dapat bekerjasama dan saling mendukung

antara anggota masyarakat tanpa pertimbangan-pertimbangan komunalistik (atau yang sekarang sering disebut “SARA”). Orientasi esensi juga lebih mudah membebaskan anggota masyarakat dari absolutisme yang biasanya terkait dengan simbolisme. Dengan begitu suatu kemestian dalam demokrasi, yaitu “*partial functioning of ideals*” akan terwujud. Demokrasi melibatkan kesediaan yang tulus melakukan kompromi dan pencarian pertemuan kebaikan (*ishlāh*), yang pasti tidak akan terlaksana dalam suatu masyarakat yang diliputi pandangan serba absolutistik. Sebagai unsur kajian Islam dan masyarakat kita, berkaitan dengan ini, baik sekali jika kita renungkan sebuah firman Allah *swt.*: “Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik (kesepakatan rahasia) mereka, kecuali bisik-bisik orang yang menganjurkan sedekah (perhatian kepada kaum lemah), atau berbuat kebajikan (*ma’rūf*), atau mengadakan perdamaian (saling pengertian) antara sesama manusia. Barang siapa berbuat demikian itu demi memperoleh perkenan Allah, maka kelak Kami berikan kepadanya pahala yang besar” (Q 4:114).

*Wa’Llāhu a’lam bi al-shawāb.* ❖